

PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL

Jaeni, Greg. Anggana L

Program Studi Ekonomika & Bisnis, Universitas Stikubank Semarang

Jl. Tri Lomba Juang No.1 Semarang Telp (024) 8311668

E-mail: jaenimunawar131@gmail.com , anggolis@yahoo.co.id

ABSTRAK

Otonomi daerah menjadikan daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya dan tidak bergantung pada Pemerintah Pusat. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengurangi ketergantungan dana perimbangan dari pusat tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Modal yang dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Penelitian ini dilakukan di wilayah administratif Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah yaitu 35 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kotamadya. Teknik analisis menggunakan regresi model *quasi moderating* dengan basis interaksi. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terbukti memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan model tersebut mampu menjelaskan variance Belanja Modal sebesar 85,2 % .

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah menyebabkan daerah tidak sepenuhnya bergantung dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut berakibat pada beralihnya manajemen pemerintahan di daerah seiring diberlakukannya desentralisasi fiskal. Adanya otonomi daerah dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung pada Pemerintah Pusat, dengan mengotimalkan sumber pendapatan daerah yang dihasilkan, dalam hal ini termasuk semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan untuk penyelenggaraan urusan daerah tersebut baik urusan wajib maupun urusan pilihan, untuk menjalankan kewajibannya dan memenuhi kebutuhan belanja daerah tersebut. Selain itu dalam wujud komitmennya dalam penerapan otonomi daerah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi akan mengalokasikan dana-dana yang dapat menambah sumber pendapatan bagi Kabupaten/Kota yang merupakan hak bagi kabupaten/kota atau yang bersifat bantuan maupun hibah.

Pemerintah Daerah dalam memproyeksikan anggaran pendapatannya salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber asli dari daerah tersebut biasanya sangatlah terbatas. Ismail (2002) Pendapatan Asli Daerah masih memiliki peran yang relatif kecil dalam struktur keuangan daerah, sehingga anggaran daerah khususnya anggaran di Kabupaten/Kota sangat bergantung sekali dengan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat yaitu dana perimbangan seperti Dana Alokasi Khusus. Sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia PAD hanya bisa membiayai kurang dari 10% pengeluaran total, kondisi semacam ini akan sangat menyulitkan bagi Kabupaten/Kota untuk melaksanakan otonomi secara nyata dan juga pendapatan dari Pemerintah di atasnya dan sumber-sumber yang lain. Namun ada beberapa Kabupaten/Kota tertentu di Jawa Tengah memiliki PAD yang memiliki kontribusi cukup besar.

Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian Adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan

kota) terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya untuk meningkatkan PAD tidak akan memberikan arti bila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Namun penelitian Brata (2004) belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan Pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya (dikutip dari David Harianto dan Priyo Hari Adi, Simposium Nasional Akuntansi X). Penelitian Solikin (2007) bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara PAD dengan Belanja Modal, hasil penelitian serupa oleh Daryanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun juga akan semakin tinggi.

Penelitian belanja modal seperti Holtz-Eakin *et al* (1994) menyatakan terhadap keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh Legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh temuan empiris yang sama yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Hasil penelitian yang dilakukan Braga (2004) PAD dan Pertumbuhan Ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif. Penelitian Solikin (2007) bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara PAD dengan Belanja Modal yang menjadi salah satu faktor yang akan diteliti apakah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan perkapita.

Di Kabupaten/Kota yang masuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan total alokasi baik dari PAD maupun dana transfer dari pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan oleh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah semakin besar namun jika dibandingkan dengan alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota tiap tahun tidak selalu bertambah naik seiring semakin bertambahnya sumber pendapatan yang diterima baik dari Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut maupun sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat. Fenomena inilah yang menarik untuk diteliti apakah alokasi dana pada tiap-tiap Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi Belanja Modal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal ?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal ?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal ?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi Belanja Modal?

2 KAJIAN PUSTAKA

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

Pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Seperti kita telah ketahui, berhasil-tidaknya program-program pembangunan di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi-rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional. Mengingat konsep pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional sudah terlanjur diyakini serta diterapkan secara luas, maka kita tidak boleh ketinggalan dan mau tidak mau juga harus berusaha mempelajari hakekat dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha

meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Faktor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Dua hal esensial harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah pertama sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tak boleh ada sumber-sumber menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien. Yang kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertumbuhannya

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Dana Alokasi Khusus

Merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan besaran ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK merupakan dana transfer yang peruntukannya sudah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan dengan arah kegiatan pada bidang tertentu yang dipergunakan untuk 19 Bidang. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, khusus dan kriteria teknis sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis dan alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sifatnya pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya yang diperhitungkan berdasarkan harga perolehan sampai barang tersebut siap untuk dipergunakan maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya. (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010; lampiran I.08 PSAP07-5).

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Dalam hal tersebut masuk ke dalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan.

Selain itu dalam melakukan belanja modal ada juga aset-aset dari hasil belanja modal yang sifatnya tidak berwujud, akan tetapi masih memiliki ciri yang sama dengan hasil dari belanja modal lainnya. Dalam hal ini tentu saja belanja modal memiliki kriteria tertentu agar dapat dikatakan sebagai belanja modal.

Terkait dengan masalah pemerintah, belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, *jogging track*, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar. Namun, tidak selalu belanja modal berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Beberapa proyek fisik menghasilkan *output* berupa bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur (birokrasi) atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik.

Pertumbuhan Ekonomi

Istilah pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan fundamental ekonomi jangka panjang suatu negara. Sehingga pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu Negara. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industry, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya jumlah sekolah, bertambahnya produksi barang modal dan bertambahnya sektor jasa.

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini (Gaspersz dan Feonay, 2003; Kuncoro, 2004).

2.3 Review Penelitian Sebelumnya

Penelitian Solikin (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara PAD dengan belanja modal, hasil serupa oleh Daryanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Demikian juga oleh Panji & Dwirandra (2012) menemukan hal yang serupa. Selain itu temuan tersebut juga mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Sementara Bobby (2010), Rizanda (2013) dan Paujiah (2012) memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian Bobby (2010) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sementara Supatman (2009) dan Husni (2011) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian Yovita (2011) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sementara oleh Panji & Dwirandra (2012) menemukan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

Braga (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yaitu PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Namun penelitian Braga (2004) belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan Pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya (David Harianto dan Priyo Hari Adi, dalam Simposium Nasional Akuntansi X).

2.4 Hipotesis

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Penelitian Solikin (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara PAD dengan belanja modal, hasil penelitian serupa dari Daryanto dan Yustikasari (2007), juga oleh Tuasikal (2008), dan Ngurah Panji & Dwiranda (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Selain itu temuan tersebut juga mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah, yang diartikan bahwa jika Pemerintah Daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Maka besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD, sehingga jika pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

DAK merupakan dana transfer dana perimbangan yang peruntukannya sudah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan dengan arah kegiatan pada bidang tertentu yang dipergunakan untuk 19 Bidang, Pemanfaatan dan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan setiap tahun pada saat pengalokasian Dana Alokasi Khusus, dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di 19 bidang tersebut (Kementerian Keuangan). Penelitiannya Husni (2011) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berkontribusi signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaturan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik dengan tujuan dapat meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan tersebut seharusnya Pemerintah Daerah dapat meningkatkan alokasi belanja pembangunan infrastrukturnya lebih tinggi dengan pendanaan yang berasal dari Dana alokasi Khusus tersebut tentunya akan berimbas pada peningkatan pengalokasian belanja untuk fisik yang dalam APBD terakomodir dalam jenis belanja barang modal. Mendasarkan gambaran diatas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2 : DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja Modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita, jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003). Pada penelitiannya Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita. Demikian juga oleh Yovita(2011) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Berdasarkan gambaran ini, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 = Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Perkembangan Ekonomi memoderasi hubungan PAD dengan Belanja Modal

Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh PAD pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkatkan PAD dan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah akan semakin meningkat. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal.

Penelitian oleh Taiwo dan Abayomi (2011) memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat disertai dengan pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka akan mampu meningkatkan belanja modal suatu daerah. Hal serupa juga ditemukan oleh Ngurah Panji & Dwiranda (2012) bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD dengan belanja modal. Berdasarkan gambaran ini, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 = Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sample Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yaitu 35 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kotamadya yang keseluruhan berada di wilayah administratif Propinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah dipilih karena merupakan salah satu provinsi dengan jumlah Kabupaten/Kota yang cukup banyak dan salah satu Propinsi yang sering mendapatkan penghargaan terkait dengan capaian yang mendukung program nasional dan pengelolaan keuangan yang baik. Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota populasi yaitu Laporan

Realisasi APBD dan tabel PDRB kabupaten/kota se-Propinsi Jawa Tengah periode 2011-2013.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian dilakukan mempergunakan data sekunder atau data yang diambil dari Laporan Realisasi APBD dan tabel PDRB kabupaten/kota se-Propinsi Jawa Tengah periode 2011-2013 serta pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2011-2013. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Data dikumpulkan melalui metode observasi non partisipan.

3.3 Pengukuran Variabel

Pendapatan Asli Daerah:

$$\text{Ratio PAD} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{APBD Kabupaten/Kota}}$$

Dana Alokasi Khusus :

$$\text{Ratio Dana Alokasi Khusus} : \frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{APBD Kabupaten/Kota}}$$

Belanja Modal:

$$\text{Ratio BM} : \frac{\text{Belanja Modal tahun } t}{\text{APBD Tahun } t}$$

Pertumbuhan Ekonomi:

$$\text{Ratio PE} : \frac{\text{Pendapatan Perkapita tahun } t - \text{Pendapatan Perkapita Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan perkapita Tahun } (t-1)}$$

3.4 Teknik Analisis

Moderating Regression Analysis

Merupakan persamaan regresi linier berganda dengan model *quasi moderating* dengan basis interaksi yaitu menggunakan satu variabel independen, satu variabel moderasi, dan satu variabel dependen dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1 * X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Belanja Modal
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Pertumbuhan Ekonomi
- a = Konstanta
- b₁, b₂, b₃ = koefisien regresi untuk masing-masing variabel
- e = standart error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal dapat dilihat pada table 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	.0975515	.9219450	.87595542	.0308561838
DAK	105	.009121	.099553	.06464757	.020366232
PE	105	.0378566	.2980164	.140444921	.0506219315

BM	105	.0378175	.2971001	.141086073	.0515168070
Valid N (listwise)	105				

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah adalah 0.08759554 dengan nilai tertinggi sebesar 0.221945 dan nilai terendah 0.047552 untuk standar deviasi 0.030856184 kondisi ini menunjukkan bahwa PAD masih rendah. DAK adalah .06464757 dengan standar deviasi .020366232 kondisi ini menunjukkan DAK masih rendah. Biaya Modal adalah 0.141086073 dengan nilai tertinggi sebesar 0.2971001 dan nilai terendah 0.0378175 untuk standar deviasi 0.0515168070 kondisi ini menunjukkan bahwa BM semakin naik. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi adalah 0.140444921 dengan nilai tertinggi sebesar 0.2980164 dan nilai terendah 0.0378566 untuk standar deviasi 0.0515168070 kondisi ini menunjukkan bahwa PE di Jawa Tengah meningkat.

4.2 Uji Goodness of Fit Models

Uji F

Uji F menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0.000, hal ini dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama model tersebut berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal sehingga secara keseluruhan model adalah fit.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien nilai *adjusted* R^2 sebesar 0.852 hal ini menunjukkan model tersebut mampu menjelaskan variance Belanja Modal sebesar 85,2 %. Selanjutnya sebesar 14,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model tersebut.

4.3 Uji Hipotesis

Pada table 2 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$BM = 0,003 + 0.671 PAD + 0.066 DAK + 0.964 PE - 0.824 PADPE$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa, PAD memiliki nilai signifikan sebesar 0.033 karena $p \leq 0.05$ maka **H1 diterima** artinya PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan DAK memiliki nilai signifikan sebesar 0.528 karena $p \geq 0.05$ maka **H2 ditolak** artinya DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sementara PE memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 karena $p \leq 0.05$ maka **H3 diterima** artinya Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dan PADPE memiliki nilai signifikan sebesar 0.009 karena $p \leq 0.05$ maka **H4 diterima** artinya PADPE terbukti memoderasi pengaruh PAD terhadap BM.

Tabel 2 Uji Hipotesis

Variabel	Coefficients	t	Sig
PAD	0.671	2.066	0.033
DAK	0.066	0.634	0.528
PE	0.964	10.857	0.000
absPADPE	-0.824	-3.243	0.009

4.4 Pembahasan

PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan meningkatnya rata-rata PAD di Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan potensi PAD mulai tumbuh. Secara kenyataannya alokasi PAD pada Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dari porsi pendapatan APBD Provinsi Jawa Tengah lebih dari 40 % dari total pos pendapatan yang ada pada APBD Provinsi Jawa Tengah dan PAD yang diperoleh dari retribusi dan pajak. Dimana dari hasil retribusi sebagian digunakan kembali untuk membiayai belanja pegawai petugas pemungut retribusi tersebut, bahkan jika dihitung pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 diperoleh prosentase rata-rata mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pajak tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya Alokasi BM yang dialokasikan di Kabupaten/Kota tidak ditentukan oleh besarnya PAD tersebut, meskipun alokasi PAD berkontribusi relatif terhadap pendapatan pada APBD Kabupaten/kota

tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikin Solikin (2007), Daryanto dan Yustikasari (2007), Tuasikal (2008), dan Putu Ngurah Panji & Dwirandra (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja Modal, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD, maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Selain itu temuan tersebut juga mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Namun temuan ini tidak sejalan dengan Bobby (2010), Rizanda (2013) dan Paujiah (2012) memperoleh hasil bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap BM.

PE berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita, jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003). Pada penelitiannya Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita. Temuan ini sejalan dengan Yovita (2011) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Sementara Panji & Dwirandra (2012) menemukan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan Dana Alokasi Khusus jumlah alokasinya jauh dibanding Dana Alokasi Umum, walaupun alokasinya untuk belanja pembangunan namun hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Supatman (2009) dan Husni (2011) bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun temuan ini sejalan dengan Penelitian Bobby (2010) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi ternyata terbukti memperkuat pengaruh PAD terhadap BM. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten/kota Jawa Tengah tumbuh sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas daerah kabupaten/kota meningkat. Hal ini mengakibatkan tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk tumbuh di beberapa kabupaten/kota sehingga secara keseluruhan merata, maka secara keseluruhan semakin tinggi kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah ternyata mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di Jawa Tengah sehingga sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah akan semakin meningkat atau bahkan berkembang. Selanjutnya karena PAD mencukupi tapi masih kecil digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai maka akan meningkatkan belanja modal. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Taiwo dan Abayomi (2011) memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat dan disertai dengan pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka semestinya mampu meningkatkan belanja modal suatu daerah. Juga sejalan dengan Panji & Dwirandra (2012) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ternyata Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dan Pertumbuhan Ekonomi terbukti memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah masih mulai meningkat namun masih tergantung dari Pemerintah Pusat. Dan ternyata beberapa wilayah Kabupaten/Kota mulai memiliki PAD yang optimal sehingga daerah tersebut memiliki kemandirian yang mulai tumbuh. Penelitian ini menunjukkan model tersebut mampu menjelaskan variance Belanja Modal sebesar 85,2 %. Selanjutnya sebesar 14,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model tersebut

5.1 Keterbatasan

1. Penelitian ini tidak mengelompokkan objek Belanja Modal yang dialokasikan yang bermanfaat atau dapat

digunakan langsung oleh masyarakat atau belanja modal yang dipergunakan untuk mendukung kinerja aparatur pemerintah di daerah tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu terhadap belanja modal yang dipergunakan untuk membiayai belanja modal yang bermanfaat langsung pada masyarakat dan belanja modal yang hanya bermanfaat untuk mendukung kinerja aparatur.

2. Rentang waktu dalam penelitian ini hanya 3 tahun anggaran, sehingga untuk menggambarkan hasil tidak komprehensif dikarenakan adanya beberapa perubahan nomenklatur pengkodean jenis belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel dengan rentang waktu yang lebih panjang.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel pada wilayah Propinsi lain sehingga bisa dilakukan komparasi dengan Propinsi Jawa Tengah.

PUSTAKA

- Abdul Halim, Abdullah Syukriy, 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140-1159.
- Abdullah Syukriy, Abdul Halim, 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 No. 2, November.
- Aloysius Gunadi Brata, 2004. *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Badan Pusat Statistik, 2011, *Jawa Tengah dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- Bird, R.M. (1998). "Analysis of Earmarked Taxes." *Tax Notes International (June23)*, pp. 2095-2116.
- Daryanto dan Yulia Yustikasari. 2007, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal, *Simposium nasional Akuntansi X, Makassar*.
- David Harianto dan Priyo Hari Adi, 2007, Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita, *Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar*.
- Ekom Koswara. 1996. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II menurut Undang-Undang No 5 tahun 1974*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial, edisi Kedua. Diterjemahkan oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gaspersz, Vincent dan Esthon Foenay. 2003. Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat Dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Rakyat. Th. II - No. 8 - Nopember 2003*.
- Hadi, 2006. *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sampel Lingkungan*. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Harry Azzar Azis, Syahrudin, 2009, *Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009*.
- Hasrina Husni, 2011, Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah Dengan Belanja Modal Sebagai variabel Intervening Studi empiris Di Kabupaten/kota Provinsi Aceh, *Initial Repository*, Universitas Sumatera Utara.

- Herlina Ismerdekaningsih, SE & Endah Sri Rahayu, SE. 2002. Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruto Di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000). *ITB Central Library*.
- Hogerwerf. 1978 Alphen Aan den Rijn: Samson, 1978, *Public Administration*, Netherland.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S, & Schuyley Tilly. 1994. Intertempora Analysis of State An Local Government Spending: Theory and Tests. *Journal of Urban Economics* 35: 159-174.
- Ikin Solikin. 2007. Hubungan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan belanja modal di Jawa Barat.
- Imam Ghozali. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Iqbal Hasan, 2006. *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Indra Bastian, 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Juli Panglima Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Kesit Bambang Prakosa. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI Vol. 8 No. 2*, 101-118.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49. Hal : 1 – 21.
- Machfud Sidik, B. Raksasa Mahi, Robert Simantjuntak, Bambang Brodjonegoro, 2002 Dana Alokasi Umum, Konsep, hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Maddick, Henry (1963) *Democracy, Decentralization and Development*. Bombay: Asia Publishing House.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, 2006, *Metode penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung Remaja Rosdan Karya, Bandung.
- Muana Nanga. 2005. Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT : Adakah Posisi Fiskal Lebih Baik. *Jurnal Studi Pembangunan KRITIS*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Mudrajat Kuncoro, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Munawar Ismail, 2002. *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*. Malang: FE Unibraw.
- Priyo Hari Adi, 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Studi Pembangunan Kritis*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Priyo Hari Adi, 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota seJawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang*.
- Singgih Santoso, 2002, *Statistic Multivariate*, PT Elex Media Komoutindo, Jakarta.
- Soejito Irawan, 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sri Mulyani Erlina, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, USU Press, Medan. Singgih 2002.

Supatman, 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Media Penelusuran Koleksi Pustaka Ilmiah*. Universitas Padjajaran Bandung.

-----, 1997, *Undang-Undang Nomor 18* Republik Indonesia. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

-----, 2004, *Undang-Undang Nomor 32* Republik Indonesia: Pemerintahan Daerah, Depdagri, Jakarta.

-----, 2004, *Undang-Undang Nomor 33* Republik Indonesia: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Depdagri, Jakarta.

-----, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 24* Republik Indonesia: Standar Akuntansi Pemerintahan.

-----, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13* Republik Indonesia, Depdagri, Jakarta.

-----, 2010 *Peraturan Pemerintah Nomor 71*, Republik Indonesia: Standar Akuntansi Pemerintah

-----, 2011 *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21* Republik Indonesia, Depdagri, Jakarta.